

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA KANTOR CAMAT SEMADAM KABUPATEN
ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI

Oleh:

Wirja Wahyu Pratama

NIM 0502162126

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA KANTOR CAMAT SEMADAM KABUPATEN
ACEH TENGGARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 Pada
Prodi Akuntansi Syari'ah UIN Sumatera Utara

Oleh:

Wirja Wahyu Pratama

NIM 0502162126

**Program Studi
AKUNTANSI SYARI'AH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirja Wahyu Pratama

Nim : 0502162126

Tempat/Tempat Lahir : Jakarta Timur, 10 Juni 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kutacane

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara)**", benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya. Sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Wirja Wahyu Pratama

Nim. 0502162126

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Kasus Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)**


Oleh Wirja Wahyu Pratama

NIM. 0502162126

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 13 Oktober 2020

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP.19760423 200312 1 001

Pembimbing II


Rahmad Daim Harahap, M. Ak
NIP.19900926 201803 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Hendra Hermain, M.Pd

NIP.19730510199803 1 003

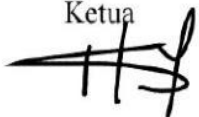
PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” Wirja Wahyu Pratama, NIM. 56154031 Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah

Medan 27 Oktober 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua



Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris



Kusmilawaty, SE, Ak, M. Ak
NIDN. 2014068001

Anggota



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN.2023017602



Rahmat Darm Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001



Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001



Yusrizal, SE, M. Si
NIDN. 2022057501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, M.A
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Wirja Wahyu Pratama. NIM. 0502162126. Skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)**” Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yasifz, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Rahmad Daim, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang ada di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu masih lemahnya Kantor Camat Semadam dalam menerapkan sistem akuntansi keuangannya, sehingga dapat mengacu berkurangnya kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan. Atas permasalahan yang telah ditemui tersebut, penulis berupaya memperoleh informasi melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait seperti bagian kabid. keuangan kabupaten aceh tenggara dan bendahara umum Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dan ditambah dengan beberapa data untuk memperkuat hasil penelitian ini, seperti data Laporan Keuangan Kecamatan Semadam Tahun Anggaran 2019. Kemudian informasi serta data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dimana metode tersebut sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, dan juga menjelaskan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara masih belum optimal dalam menerapkan Sistem Akuntansi keuangan daerah disebabkan kualitas sumberdaya manusianya masih kurang dalam hal pengetahuan maupun tingkat pendidikan.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)**”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasalam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai di sisi-nya.

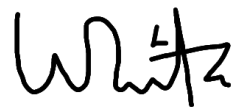
Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terbaik dalam pembuatan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak **Hendra Hermain, SE, M.Pd** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan **Ibu Kusmilawaty, Ak, M.Ak** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.

3. Bapak **Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku pembimbing I dan bapak **Rahmad Daim Harahap, M.Ak** selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Bapak **Fauzi Arif Lubis, MA** yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara Bapak **Sukri Khairin, R,S.Sos,M.Si** dan seluruh pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Semadam telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian.
7. Orang tua tercinta Ayahanda **Wakdul Amin, SH** dan Ibunda **Kamsinar, S.Pd** yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan baik dalam hal moril maupun materi kepada penulis.

Medan, 25 September 2020

Penulis



Wirja Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSEUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis	8
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8
2. Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam	11
3. Akuntansi Keuangan Daerah	13
a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	13
b. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah	13
c. Karakteristik Akuntansi Pemerintah	14
d. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	14
e. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
a. Relevan.....	19
b. Andal	20
c. Dapat Dibandingkan.....	20
d. Dapat Dipahami	21
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21
a. Pengertian Laporan Keuangan Daerah.....	21
b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	23
c. Komponen Laporan Keuangan SKPD	25

5. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	28
a. Materialitas.....	28
b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat	29
c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.....	29
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber dan Jenis Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
C. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Opini BPK-RI Atas LKPD Tahun 2014-2019	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdaulu	30
Tabel 4.1. Nama - Nama Desa di Kecamatan Semadam	38
Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran	46
Tabel 4.3. Neraca	47
Tabel 4.4. Laporan Operasional	48
Tabel 4.1. Laporan Perubahan Ekuitas	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kecamatan Semadam.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan yang ada dipemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa indonesia. Masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Disebabkan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh pada organisasi sektor swasta dalam pembuatan laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek, sehingga aparatur pemerintah sering terkedala pada saat penyusunan laporan keuangan.¹

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban pihak atau staf bagian keuangan pada suatu pemerintahan dan laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Karena laporan tersebut merupakan gambaran keuangan berupa transaksi-transaksi atau peristiwa-

¹Riyanti Umi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan*. Riau. Jurnal. 2011

peristiwa yang terjadi pada suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan sumber informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, begitu juga bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Adapun beberapa laporan keuangan pemerintah terdiri dari:²

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Perubahan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di negara kita, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³

Dalam mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain diterapkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Perubahan tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah , sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut berisi menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan

² V. Wiratna Sujarweni. "*Analisis Laporan Keuangan*". Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2017

³ Marja Sinurat, "*Akuntansi Keuangan Daerah*". Ghalia Indonesia. 2018

menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya.⁴

Kemudian Menteri Dalam Negeri menyempurnakan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasi mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 25 Tahun 2004 yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah⁵. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan mampu menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi/instansi pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP.No 71 Tahun 2010 tentang (SAP) adalah sebagai berikut :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan disisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh

⁴ *Ibid.*

⁵Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
2010

penghasilan untuk menutupi seluruh biaya tersebut, juga berusaha untuk mencegah dan menghindari pemborosan dari hal-hal yang dianggap merugikan karena hal tersebut akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan instansi pemerintah tersebut. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.⁶

Pada intinya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, dan selain melakukan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pengauditan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sangat dibutuhkan juga agar hal tersebut dapat tercapai berupa opini, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat.

Tabel 1.1

Opini BPK-RI Atas LKPD Tahun 2014-2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2014	38%	59%	0%	3%	100%
2015	60%	40%	0%	0%	100%
2016	65%	33%	2%	0%	100%
2017	77%	22%	1%	0%	100%
2018	86%	14%	0%	0%	100%
2019	89%	11%	0%	0%	100%

Sumber : LHP BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Dari data diatas masih ada saja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam penjelasan opini yang diberikan oleh BPK menjelaskan bahwa LKPD yang belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena

⁶ Baldric Seregar. " *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2: Penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta. 2017.

dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kabupaten yang terdiri dari 19 kecamatan, serta 368 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 655.48 Km² dan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 Km². Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Semadam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban yaitu Kecamatan Semadam pada Kantor Camat Semadam, Hal ini disebabkan karena aparatur pemerintah yang ada di Kantor Camat Semadam belum memiliki kualitas pelayanan dan kinerja yang baik.

Padahal seperti yang diketahui bahwa Kantor Kecamatan merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, mutu kesehatan dan lain-lain.

Kantor Camat Semadam didirikan pada tahun 2004 setelah pemekaran pada tahun 2003 yang beralamat di Jln. Panglima Polem, Desa Semadam Asal, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Hingga saat ini jumlah karyawan yang bekerja di Kantor Kecamatan berjumlah 24 orang yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kasi Pemerintah, Kasi PMD, Kasi Yan Mum, Kasi Kesra, Kasi Trantib dan staf-staf lainnya⁷. Kantor Camat Semadam dalam pengelolaan dana APBD telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari dokumen, pencatatan dan menghasilkan laporan keuangan. Metode sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan selama ini adalah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan basis akrual (*acrual basis*) sebagai bahan pembuatan laporan keuangan.

Adapun beberapa kasus kesalahan yang terjadi pada Kantor Camat Semadam mengenai laporan keuangannya seperti:

⁷ Wawancara dengan bapak Mujiburrahman. S. Sos, tanggal 28 maret 2020 di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan SAP
3. Keterlambatan menyampaikan laporan
4. Sistem informasi dan pelaporan belum didukung SDM yang berkualitas.

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kualitas laporan keuangan Kantor Camat Semadam masih belum baik mulai dari tahap pencatatan sampai tahap pelapora masih banyak kedalahan, itu artinya sistem akuntansi keuangannya belum diterapkan dengan baik oleh staf bendaharannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa, “Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam masih belum optimal begitu juga dengan laporan keuangannya, serta Kantor Camat Semadam dalam proses penyusunan laporan keuangan masih harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, agar laporan keuangan yang mereka buat tidak mengalami kesalahan dan keterlambatan pada saat pelaporan.”⁸

Selain hal tersebut, Kantor Camat Semadam juga merupakan instansi yang telah di cap sebagai instansi yang memiliki kinerja serta pelayanannya yang buruk, hal ini didukung oleh pernyataan langsung dari Bapak Bupati Aceh Tenggara yakni bapak Drs. H. Raidin Pinim, M.AP.⁹

Dengan adanya uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada. Penulis ingin meneliti lebih jauh tentang hal tersebut dengan judul penelitian “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)**”

⁸Wawancara dengan bapak Sulaindra. SP,SE,MM, tanggal 05 April 2020 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

⁹Sumber: *waspadaaceh.com* Di download tanggal 1 Agustus 2020

B. Batasan Masalah

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, serta keterbatasan waktu dan pengetahuan agar pembahasan masalah lebih fokus dan spesifik maka penulis hanya membatasi penelitiannya mengenai;

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kesesuaian Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam dengan UU. No. 71 Tahun 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah;

1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam Telah Sesuai dengan UU.No 71 Tahun 2010?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas adalah untuk mengetahui

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Apakah Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam telah memiliki kualitas yang sesuai dengan UU.No 71 Tahun 2010?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, sebagai bahan praktek atas apa yang telah dipelajari pada saat perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjut nya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam meminimalisir kendala dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, khususnya kepada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Halim bahwa akuntansi diartikan sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, demikian *output* akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan, yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.¹⁰

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Sugiyanto mengatakan bahwa akuntansi meliputi beberapa cabang yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*), akuntansi manajemen (*accounting managment*, dan akuntansi pemerintahan (*government accounting*). Dalam akuntansi keuangan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Dalam akuntansi menejemen, data yang digunakan untuk memberikan dasar kepada menejemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Dalam akuntansi pemerintahan, data yang digunakan untuk memberikan informasi ekonomi dan keuangan pemerintah

¹⁰Halim, Abdul "Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta : Salemba Empat. 2007

baik daerah maupun pusat diberikan kepada pihak, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.¹¹

Mulyadi menyatakan “Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”¹²

Menurut Sadeli Sistem Akuntansi adalah Metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem Akuntansi terdiri dari atas dokumen bukti transaksi, alat - alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan untuk mencatat transaksi - transaksi serta melaporkan hasilnya.¹³

Alam mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai berikut:

“Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen”¹⁴.

Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

¹¹Sugiyanto, Catur. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: BPFE. 1995

¹²Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta. 2001. hlm. 56

¹³Sadeli, Lili. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara. 2001. hlm. 80

¹⁴Alam, S. *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis. 2004. hlm. 92

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 mengatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.¹⁵

Menurut Deddi Nordiawan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut : “Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.”¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk

¹⁵<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/> di download tanggal 2 September 2020

¹⁶Nordiawan Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba 4, 2010

memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern maupun ekstern pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Suatu pencatatan transaksi dalam suatu instansi atau perusahaan yang menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik harus sesuai dengan syariat islam. Laporan-laporan keuangan tersebut baik yang bersifat umum maupun khusus akan memberikan informasi yang berguna jika sistem keuangannya diterapkan secara optimal.

Sistem akuntansi dalam konsep syariah didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah islam, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan yang menjadi pijakan dalam menjelaskan peristiwa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki (diantara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil dari sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu’amalahmu itu, kecuali mu’amalah itu dagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu sesuatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”¹⁷

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah, SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman jika melaksanakan transaksi hutang piutang, dengan melengkapi alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin dikemudian hari. Dalam hal ini, instansi yang baik akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti. Ayat ini juga menjelaskan adanya kewaspadaan

¹⁷ <http://ilmudanaquran.blogspot.co.id/2015/02/terjemah-tafsir-dan-analisa-ekonomi.html> di download tanggal 02 september 2020

dan penjegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi.

3. Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Akuntansi Keuangan daerah Menurut Abdul Halim, “Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas”¹⁸.

Pihak-pihak eksternal entitas yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan pengawasan keuangan, investor, kreditor, donator, rakyat dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

b. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Nordiawan Akuntansi Keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1) Tujuan Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

2) Tujuan manajerial

Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah

¹⁸Halim Abdul, *Akuntansi Keangan Daerah edisi ketiga Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

3) Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.¹⁹

c. Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Menurut Baldric dan Boni Siregar, terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu:

1) Penggunaan Dana

Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat akun yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

2) Peranan Anggaran

Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada perencanaannya.

d. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari²⁰ :

¹⁹Nordiawan Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba 4, 2010

²⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1) Pengakuan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan.

Poin penting dari kebijakan ini berisi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis Kas dan Basis Akrua.

a) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai²¹.

b) Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Berdasarkan SAP No.01 mengenai basis akrua, basis akrua memiliki arti sebagai berikut. Basis akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

Cara pembuktian akrua basis membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi

²¹Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2007

tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilakukan sudah atau belum.

2) Pengukuran Akuntansi

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintahan daerah (UASID 2009). Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual beli ketika transaksi tersebut dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku).

3) Penyajian Akuntansi

Ikhtikar-ikhtikar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan laporan Realisasi Anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

- 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah:

“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer”²². Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SKPD).PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- a) Surat tanda bukti pembayaran;
- b) STS
- c) Bukti transfer
- d) Nota kredit Ban

- 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah:

“Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD).PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

- a) SP2D;
- b) Nota Debet Bank; dan
- c) Bukti pengeluaran kas lainnya.

- 3) Prosedur Akuntansi Aset, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah : “Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”²³. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja Perangkat Daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:
- a) Jenis/nama aset tetap;
 - b) Kode rekening;
 - c) Klasifikasi aset tetap;
 - d) Nilai aset tetap; dan
 - e) Tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Prosedur akuntansi selain kas

²³*Ibid.*

dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:

- a) Berita acara penerimaan barang;
- b) Surat keputusan penghapusan barang;
- c) Surat keputusan mutasi barang;
- d) Berita acara pemusnahan barang;
- e) Berita acara serah terima barang;
- f) Berita acara penilaian; dan
- g) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP No. 71 Tahun 2010

Kualitas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 Karakteristik berikut ini merupakan pra syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu;

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan adalah:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- 3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”²⁴.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo²⁵ mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants-Public Sector Committee* (IFAC-PSC) dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Badan legislatif dan Badan-Badan Lainnya

Badan Legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan

²⁴Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

²⁵Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2) Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

3) Investor dan kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.

4) Pemerintah Lain, Badan Internasional, dan Penyedia Sumber Lain

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

5) Analisis Ekonomi dan Keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo²⁶ memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

²⁶Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2004.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)²⁷ menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

²⁷Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Komponen Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan /menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.²⁸

6. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Dalam kendala SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi

²⁸*bpkad.sumutprov.go.id* di Download pada tanggal 18 juli 2020

pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. **Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dapat dipenuhi dengan laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan tinjauan pustaka yaitu beberapa penelitian berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Fitri Ningsih	Analisis Penerapan	Metode analisis	Bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan

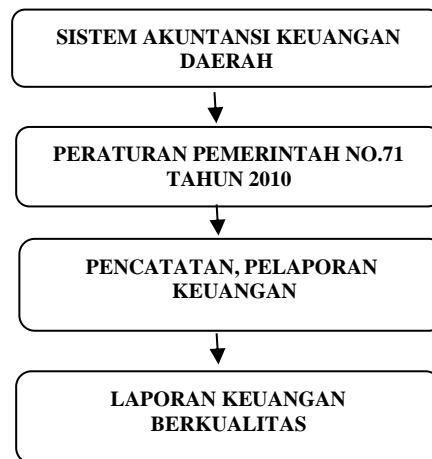
	(2013)	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	deskriptif	pemerintah pada Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
2.	Muchamad Syaafi Adriansyah (2013)	Analisis Implimentasi Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Pada BAUK Universitas Negeri Malang adalah a) Sistem pencatatan menggunakan <i>double entry</i> sesuai dengan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang di amankan pada PMK 76/PMK.05/2008, b) Basis akuntansi menggunakan basis akrual, c) Laporan Keuangan sudah sesuai dengan SAK dan SAP
3.	Vini Oksilia Tandayu, Meily Y.B Kalalo	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada	Metode analisis deskriptif	Hasil menunjukkan kualitas Pelaporan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolmong sudah sesuai dengan aturan yang

	(2019)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow		telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan.
4.	Rosmalinda (2019)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Rumah Sakit umum Daerah Kayu Agung Kabupaten OKI	metode analisis deskriptif	Menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kayu Agung kabupaten Oki tidak sesuai dengan prosedur pendapatan daerah dan prosedur belanja daerah

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan suatu alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu pemikiran yang membuahkan kesimpulan yang berupa hasil temuan penelitian.²⁹

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009 hlm.58



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dengan menerapkan sistem Akuntansi keuangan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan adanya peraturan tersebut diharapkan laporan keuangan dalam suatu entitas pemerintah memiliki laporan keuangan yang benar-benar berkualitas, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan judul yang telah di kemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang setiap temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya yang menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh peneliti.³⁰

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Semadam yang beralamat di Jalan Panglima Polem Desa Semadam Awal Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 bulan, mulai dari bulan November 2019. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

³⁰Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Citapusaka Media), 2014 hlm.35

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan									
		2019		2020							
		Okt	Nov	Feb	April	Mei	jun	jul	Agt	Sep	Okt
1.	Penerimaan Judul										
2.	Penyusunan Proposal										
3.	Perizinan Penelitian										
4.	Pengumpulan Data										
5.	Analisis Data										
6.	Penyusunan Laporan Penelitian										
7.	Selesai Penelitian										

C. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data atau informasi yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan agar dapat memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan Kabid. Keuangan Kantor Bupati Aceh Tenggara dan Bendahara umum Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.³¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga lainnya dan diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen laporan keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.³²

³¹Purhantara, W. Metode penelitian kualitatif untuk bisnis. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2010), hlm 79

³²*Ibid.*, hlm 84

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan laporan keuangan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan kepala bagian Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara dan bendahara Umum Kantor Camat Semadam sendiri untuk memberikan dan memperlihatkan data mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta kendala-kendala dalam hal meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah orang yang diwawancarai ada 2 orang yaitu Kepala Bidang Keuangan kabupaten Aceh Tenggara dan Bendahara Umum Kantor Kecamatan Semadam.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data-data sekunder yaitu berupa catatan-catatan dan laporan pertanggungjawaban atau data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Materi yang diperlukan dalam penelitian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Camat Semadam adalah:

- a. Data mengenai profil pihak Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara mencakup: visi, misi, struktur organisasi, serta gambaran penerapan Sistem Akuntansi pada pihak Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan disusun kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. mengorganisir data

Peneliti mendapatkan data langsung melalui wawancara terstruktur, artinya data diperoleh melalui wawancara langsung dengan memberikan draf pertanyaan kepada yang diwawancarai. Setelah melakukan wawancara, kemudian membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan saksama, kemudian melulis kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan di sederhanakan dengan membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya.

3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan maka peneliti akan bertanya lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

4. Hasil interpretasi

Hasil Interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data, kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan daftar checklist. Untuk memperoleh hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan

menggunakan daftar *checklist*, dimana pilihan jawaban yang disajikan adalah Ya dan Tidak. jawaban Ya =1 dan Tidak =0. Dan untuk menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Rumus Dean J.Champion sebagai berikut :

- a. 0%-25% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya tidak baik
- b. 25%-50% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya kurang baik
- c. 50%-75% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya cukup baik
- d. 75%-100% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya sangat baik

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Secara geografis Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3°55'23" - 4°16'37" Lintang Utara dan 96°43'23' - 98°10'32" Bujur Timur dengan topografi yang bervariasi. Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit Barisan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Lauser. Ketinggian tempat Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 m dpl - 400 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.321,41 km² dengan batasan - batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subussalam.

Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Kota Kutacena yang berjarak sekitar 900 Km dari Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif terdiri dari 19 kecamatan, 368 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 655.48 Km² dan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 Km².³³

³³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara di Download pada tanggal 18 juli 2020

2. Gambaran Umum Kecamatan Semadam

Secara geografis Kecamatan Semadam berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan batas administratif wilayah Kecamatan Semadam berbatasan dengan beberapa wilayah kecamatan yang ada disekitar Kecamatan Semadam. Adapun Batasan - batasannya yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Tusam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Segala
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanoh Alas

Luas wilayah Kecamatan Semadam adalah 35,34 Km², dengan memiliki 19 desa, desa - desa tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Nama - Nama Desa di Kecamatan Semadam

No	Nama Desa
1	Desa Lawe Petanduk 1
2	Desa Lawe Petanduk
3	Desa Kebun Sere
4	Desa Pasar Puntung
5	Desa Kampung Baru
6	Desa Titi Pasir
7	Desa Simpang Semadam
8	Desa Lawe Mejile
9	Desa Lawe Beringin Gayo
10	Desa Suka Makmur
11	Desa Semadam Awal
12	Desa Semadam Asal
13	Desa Lawe Beringin
14	Desa Sepakat Segenap
15	Desa Ngalur Buluh
16	Desa Lawe Kelapter
17	Desa Lawe Kinga Gabungan
18	Desa Lawe kingan Tebing Tinggi
19	Desa Selamat Indah

Sumber : Aceh tenggara dalam angka 2018

Kecamatan Semadam sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, disamping itu juga ada yang bekerja di sektor pemerintah seperti, Pegawai Negeri Sipil.

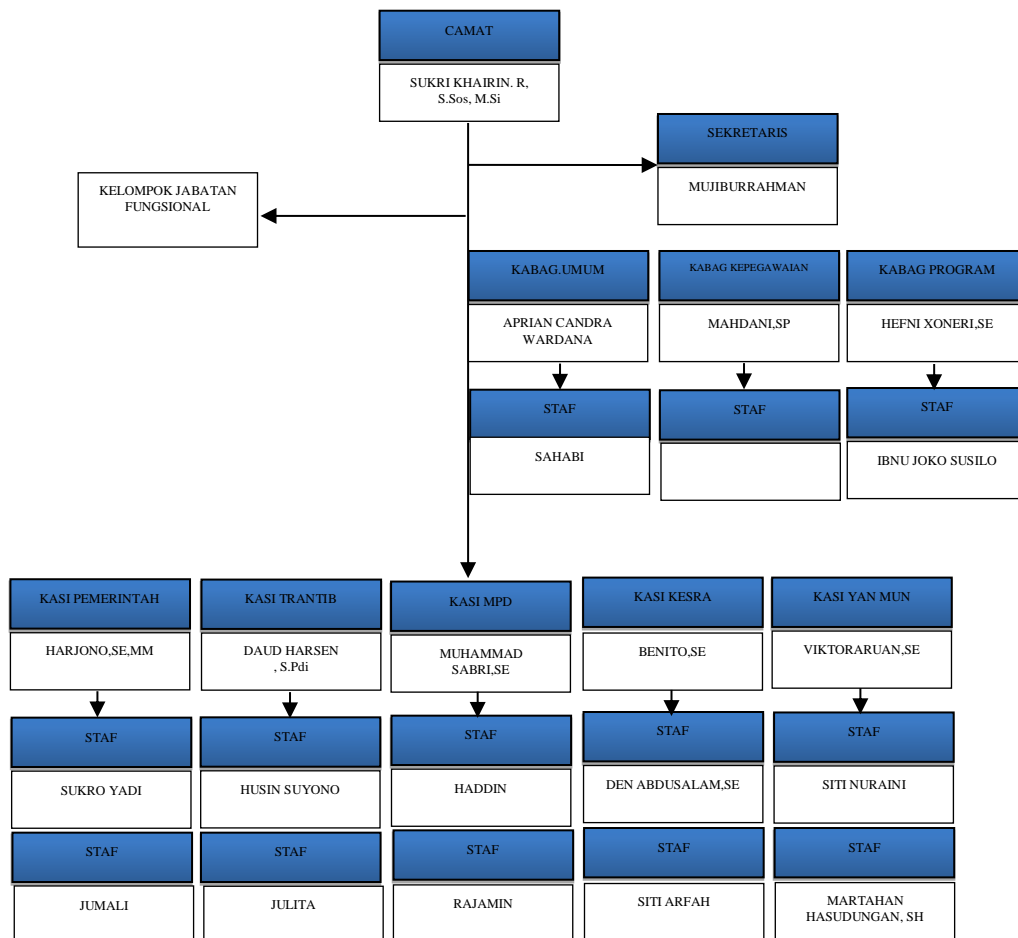
Adapun mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Semadam adalah agama islam dan kristen yang telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Namun mayoritas penduduk Kecamatan Semadam adalah beragama islam, dan sarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Semadam hanya mesjid dan gereja.³⁴

3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Semadam

Organisasi didirikan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya dapat berorientasi kedisiplinan serta tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Semadam adalah sebagai berikut:

³⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Aceh_Tenggara di Download pada tanggal 18 juli 2020



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Semadam

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mencaputujuan dan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan suatu instansi atau lembaga pemerintahan.

4. Uraian tugas Pemerintah Kecamatan Semadam

a. Camat

Merupakan pemimpin kecamatan dan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota. Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yaitu :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – sundangan
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum
- 5) Mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
- 6) Membina penyelenggara Pemerintah Desa atau Kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan

b. Sekretaris Camat

- 1) Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi perkantoran
- 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- 3) Pengendali surat - surat dan nota dinas
- 4) Pengendalian urusan perlengkapan
- 5) pengendalian urusan rumah tangga
- 6) melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan camat

c. Sub bagian Umum

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang umum dan keuangan
- 2) Melaksanakan urusan kesektarian
- 3) Menyimpan, Mengatur dan memelihara arsip dinas
- 4) Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Melakukan pengklasisifikasian surat - menyurat menurut jenisnya.

- 6) Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga dinas.
- 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Sub bagian Kepegawaian

- 1) Bertanggungjawab kepada sekretaris Kecamatan.
- 2) Melakukan pemberian dukungan administrasi ketata usahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentansi serta pelayanan informasi kecamatan.
- 3) Menyusun rencana penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, menata ke arsip dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumah tanggaan dan pengelolaan perlengkapan kecamatan
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administira kepegawaian
- 6) Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitas rencana kebutuhan kantor kecamatan.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi

e. Kepala Seksi Pemerintah

- 1) Merencanakan pengembangan dan melaksanakan urusan otonomi daerah
- 2) Melaksanakan tugas pemerintahan pusat
- 3) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pemerintah kelurahan

- 4) Melaksanakan administrasi kependudukan dan capil
- 5) Melaksanakan administrasi monografi dan peta wilayah kecamatan dan kelurahan
- 6) Melaksanakan pembinaan sosial politik
- 7) Melaksanakan tertib administrasi pertanahan
- 8) Mengerjakan buku harian camat
- 9) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan camat

f. Kepala Seksi Pelayanan Umum

- 1) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum baik intern maupun ekstern
- 2) Merumuskan dan melaksanakan bidang kekayaan dan inventarisasi
- 3) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang k3 serta sarana dan prasarana umum
- 4) Melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian
- 5) Pelayanan pajak bumi dan bangunan
- 6) Pelayanan pendapatan daerah
- 7) Pelayanan bidang penerangan
- 8) Pelayanan kebersihan kantor
- 9) Pelayanan dan persiapan apel atau upacara
- 10) Pelayanan ketatausahaan kantor dan arsip
- 11) Pelayanan tamu - tamu Camat
- 12) Tugas - tugas lain yang diberikan camat

g. Kepala Seksi Tata Tertib

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Seksi pelaporan dan Tata tertib
- 2) Menerima, meneliti laporan harian dan berita acara pengamanan dari satu pengamanan yang bertugas
- 3) Menyusun laporan dibidang Keamanan dan Tata Tertiblembaga Masyarakat

- 4) Menjaga, memelihara dan menegakkan Keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 6) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 7) Melakukan pengawasan melekat
- 8) Menyusun laporan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

h. Kepala Seksi PMD

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangun.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melakukan tugas - tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

i. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat
- 2) Melaksanakan kegiatan dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa
- 3) Melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat
- 4) Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna
- 5) Melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat.

- 6) Membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan, Laporan Keterangan, dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 7) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Semadam

a. Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, ada pun Visi Kecamatan Semadam adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA KECAMATAN SEMADAM SEBAGAI MODEL PELAYANAN PUBLIK YANG MADANI, RESPONSIF, DAN AKUNTABEL "

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Semadam, yang lebih baik, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta mengajak masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

b. Misi

Yang dimaksud dengan Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visii tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kecamatan Semadam adalah :

- 1) Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif
- 3) Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- 4) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan kecamatan yang mandiri dan dinamis
- 5) Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam

Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggarannya dalam satu periode pelaporan di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 4.2

**Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam
Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pendapatan Zakat, Infak, dan Shadaqah	20.892.000	23.851.786
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20.892.000	23.851.786
JUMLAH PENDAPATAN	20.892.000	23.851.786
BELANJA		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	1.738.948.091	1.591.970.970
Belanja Barang dan Jasa	570.195.000	484.675.000
Jumlah Belanja Operasi	2.309.143.091	2.076.645.790
SURPLUS/DEFISIT	(2.309.143.091)	(2.076.645.790)

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 23.851.786 terdiri dari Pendapatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Rp. 23.851.786

Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.076.645.790 terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 1.591.970.970
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 484.675.000

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 4.3
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam
Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	625.000	
Persediaan	802.000	738.000
Jumlah Aset Lancar	1.427.000	738.000
ASET TETAP		
Tanah	70.000.000	70.000.000
Peralatan dan mesin	157.120.000	157.120.000
Gedung dan Bangunan	154.000.000	116.050.000
Akumulasi Penyusutan	(740.143.905)	(708.452.987)
Jumlah Aset Tetap	(359.023.905)	(365.452.987)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban		227.540
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		227.540

Jumlah Kewajiban		227.540
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	(8.640.750.939)	6.570.825.771)
R/K PPKD	8.283.154.034	6.205.883.244
Jumlah Ekuitas	(357.596.905)	(364.942.527)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(357.596.905)	(364.942.527)

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 357. 596. 905 terdiri dari:

- Aset Lancar Rp. 1.427.000
- Aset Tetap Rp. 359.023.905
- Aset Lainnya Rp. 357.596.905

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 227.540 terdiri dari:

- Utang Pihak Ketiga Rp. -
- Utang Beban Rp. 227.540

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 357.596.905

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 01 Januari 31 Desember 2019.

Tabel 4.4
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam
Laporan Operasional
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pendapatan Zakat, Infak, dan Shadaqah		23.851.786
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		23.851.786
BEBAN		

BEBAN OPERASI		
Beban Pegawai	1.591.970.790	1.589.869.870
Beban Barang Dan Jasa	484.383.460	318.759.800
Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.520.918	31.789.000
Jumlah Beban Operasi	2.107.875.168	1.940.418.670
JUMLAH BEBAN	2.107.875.168	1.940.418.670
SURPLUS/DEFISIT LO	(2.107.875.168)	(1.916.566.884)

Jumlah pendapatan dan beban selama periode 01 Januari 31 Desember 2019 yaitu :

- Pendapatan Rp. -
- Beban Rp. 2.107.875.168

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Tabel 4.5

**Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Semadam
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Ekuitas Awal	(364.942.527)	1.939.400.273
Surplus/Defisit LO	(2.107.875.168)	(1.916.566.884)
Dampak Kumulaif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Aset Tetap	37.950.000	(2.273.194.000)
R/K PPKD	2.077.270.790	1.885.418.084
Ekuitas Akhir	(357.596.905)	(364.942.527)

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 364.942.527 surplus LO sebesar Rp. 2.107.875.168 selisih aset tetap sebesar Rp. 37.950.000 sehingga jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 357.596.905

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara menguraikan tentang penjelasan umum tentang Kantor Camat Semadam, dasar hukum, kebijakan akuntansi, ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan serta penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kantor Camat Semadam Tahun 2019 ini memuat LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Semadam

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, hingga elemen lain dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik daerah tersebut. Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas di dalam instansi tersebut dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dari laporan keuangan Kantor Camat Semadam yang telah peneliti paparkan di atas menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan, akan tetapi seluruh hasil laporan keuangan tersebut bukan dilakukan oleh pihak atau bagian bendahara dari Kantor Camat Semadam tetapi pihak lain yaitu pihak Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam belum dikatakan baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu laporan keuangan Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Karena dalam hal ini yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara, seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang tugas dan fungsinya ialah

menangani keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam, staf atau pihak tersebut adalah bagian Bendahara Kantor Camat Semadam. Seperti yang diketahui tugas pokok dan fungsi bendahara kecamatan adalah mengordinasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan serta aset yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam hal ini bagian bendahara Kantor Camat Semadam tidak mematuhi UU. No. 1 Tahun 2014 tentang seorang bendahara harus memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu seorang bendahara diuntut untuk memiliki kualifikasi tertentu sebelum menjadi seorang bendahara semisal, karakter, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, pengetahuan keuangan dll.

Jadi meskipun laporan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan tetapi jika yang membuat laporan keuangan tersebut adalah pihak lain yaitu bagian Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dapat dikatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kecamatan Semadam belum diterapkan dengan baik. Adapun hasil wawancara dengan kepala Kabid. Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Bapak Sulaindra mengatakan :

“Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam masih belum optimal begitu juga dengan laporan keuangannya, serta Kantor Camat Semadam dalam proses penyusunan laporan keuangan masih harus dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, agar laporan keuangan yang mereka buat tidak mengalami kesalahan dan juga tidak mengalami keterlambatan pada saat pelaporan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaindra dapat diambil kesimpulan bahwa, penerapan sistem akuntansi keuangan di Kantor Camat Semadam masih belum baik. Hal tersebut terjadi disebabkan kualitas sumber daya manusia pada instansi tersebut masih kurang.

Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan dilaporkan secara lengkap. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat

waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Di audit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan auditor independent. Hal ini di sebabkan audit laporan keuangan yang di hasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

Dengan adanya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara Khususnya Kantor Camat Semadam diharapkan mampu menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas sebab laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kantor Camat Semadam dengan PP No.71 Tahun 2010

Penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Semadam belum memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum didalam PP No.71 tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.³⁵Karena berdasarkan hasil pembahasan dengan menerapkan PP .No 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disajikan Kantor Camat Semadam seperti LRA, Neraca, LP Operasional, LP Perubahan Ekuitas, Laporan SAL dan CALK, laporan keuangan tersebut masih banyak mengalami kesalahan, sehingga laporan keuangan tersebut belum bisa dikatakan andal dan relevan, karena instansi tersebut belum mampu menciptakan atau membuat sendiri laporan keuangannya. Dalam hal tersebut di perkuat dengan adanya PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 10 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa; Pejabat pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu “menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya³⁶, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bendahara harus mampu melaksanakan/menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta mampu menyajikan informasi keuangan daerah dengan baik.

³⁵Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat). 2002. Hal. 7

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 10 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan:

- a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah, perlu dilakukan peyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, guna penyeragaman dan tertib penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
 - a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1974 tentang pembentukan daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
 - b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034)
 - c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
 - d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

- f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438)³⁷

Mengenai penelitian ini peneliti menggunakan Rumus Dean J. Champion mengemukakan tingkat kesesuaian sebagai berikut :

- a. 0%-25% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya tidak baik
- b. 25%-50% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya kurang baik
- c. 50%-75% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya cukup baik
- d. 75%-100% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan perintah daerah dan kualitas laporan keuanganya sangat baik³⁸

³⁷ Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

³⁸Champion, Dean J, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Alih Bahasa : E. Koesworo, PT. Refika, Jakarta. 1990. Hal. 67

Berdasarkan table *checklis* yang ada dapat memberi gambaran mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan Kantor Kecamatan Semadam sebagai berikut:

1. Pertanyaan 1 : Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Pertanyaan 2 : Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam tidak baik.
3. Pertanyaan 3 : Apakah transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam dilakukan tanpa analisis transaksi/identifikasi transaksi
4. Pertanyaan 4 : Apakah Kantor Camat Semadam melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan
5. Pertanyaan 5 : Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam didukung oleh bukti transaksi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak setiap transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam didukung oleh bukti transaksi.
6. Pertanyaan 6 : Apakah Kantor Camat Semadam semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam semua transaksi keuangan sudah dilakukan pencatatan secara kronologis
7. Pertanyaan 7 : Apakah Kantor Camat Semadam melakukan

pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.

8. Pertanyaan 8 : Apakah Kantor Camat Semadam melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing.
9. Pertanyaan 9 : Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pengendalian sudah dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan
10. Pertanyaan 10 : Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan setiap periode akuntansi
11. Pertanyaan 11 : Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan Laporan keuangan sudah dilakukan secara konsisten dan periodik.
12. Pertanyaan 12 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu
13. Pertanyaan 13 : Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.
14. Pertanyaan 14 : Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu sesuai periode akuntansi.

15. Pertanyaan 15 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian keputusan.
16. Pertanyaan 16 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah menghasilkan informasi yang wajar dan jujur.
17. Pertanyaan 17 : Apakah Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda.
18. Pertanyaan 18 : Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
19. Pertanyaan 19 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
20. Pertanyaan 20 : Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
21. Pertanyaan 21 : Apakah informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dipahami dengan jelas.

22. Pertanyaan 22 : Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Camat Semadam sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Camat Semadam belum disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
23. Pertanyaan 23 : Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Semadam memiliki kualitas yang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Semadam belum memiliki kualitas yang baik.
24. Pertanyaan 24 : Apakah Kantor Camat Semadam mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kantor Camat Semadam tidak mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean J. Champion yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawabanya}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100$$

$$\text{"Ya"} = \frac{11}{24} \times 100 = 45\%$$

$$\text{"Tidak"} = \frac{13}{24} \times 100 = 54\%$$

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban diatas yaitu 45% jawaban menyatakan “Ya”. Sedangkan 54% jawaban wawancara menyatakan “Tidak” maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah di Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara telah dinilai kurang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian - uraian yang telah penulis paparkan baik dari data - data maupun informasi penelitian kemudian dianalisis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun beberapa kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkan yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi pelaksanaan di lapangan bahwa yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak bagian Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara, seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang tugas dan fungsinya menangani keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam, staf atau pihak tersebut adalah bagian Bendahara Kantor Camat Semadam. Tugas pokok dan fungsi bendahara kecamatan adalah mengordinasikan dan bertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan serta aset yang dimiliki oleh instansi tersebut. Walaupun laporan keuangan di Kantor Camat Semadam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah namun jika yang membuat laporan keuangan tersebut adalah pihak lain, maka dapat dikatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kecamatan Semadam belum dilaksanakan dengan baik.

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam belum dapat dikatakan baik, hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal

pengetahuan maupun tingkat pendidikan dan belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara intensif yang dibuat oleh Kantor Camat Semadam bagi bendahara Kecamatan Semadam, sehingga dampak dari permasalahan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh Kantor Camat Semadam.

B. Saran

Mengenai penerapan system akuntansi keuangan daerah yang di lakukan di Kantor Kecamatan Semadam, saya memberikan beberapa saran berikut :

1. Sebaiknya pada tahun berikutnya kepada Kantor Kecamatan Semadam, sebagai entitas pelaporan dalam hal melaporkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, agar mampu membuat laporan keuangan sendiri secara lengkap sesuai dengan Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dalam peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan jika ada kekeliruan dapat dikonsultasikan ke pihak yang lebih memahami tentang keuangan agar segera di perbaiki dan diarahkan. Dalam hal ini penulis sarankan agar Kantor Camat Semadam lebih membuka jaringan dengan lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan.
2. Agar kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam memiliki kualitas yang baik, disarankan agar membuat pelatihan khusus kepada pegawai yang berwenang dalam hal keuangan dan disarankan juga lebih mengutamakan pegawai yang berpendidikan akuntansi/ekonomi yang menjadi pegawai dalam urusan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam, karena pendidikan tersebut sudah memiliki besik mengenai hal keuangan dan agar kendala - kendala seperti keterlambatan tidak terulang kembali dan tidak perlu lagi badan keuangan turun tangan untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintahan :Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Alam, S. *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis. 2004.

Anthony N. Robert dan Vijay Govindarajan. *Managagement Control System. I*. Jakarta.: Salemba Empat. 2005.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2010) hlm.34

Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2007

bpkad.sumutprov.go.id di Download pada tanggal 18 juli 2020

Champion, Dean J, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Alih Bahasa : E. Koesworo, PT. Refika, Jakarta. 1990.

Halim Abdul, *Akuntansi Keangan Daerah Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Halim, Abdul “*Akuntansi Keuangan Daerah*”. Jakarta : Salemba Empat. 2007

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2012

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara di Download pada tanggal 18 juli 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_gampong_di_Kabupaten_Aceh_Tenggara di Download pada tanggal 18 juli 2020

<http://ilmudanalquran.blogspot.co.id/2015/02/terjemah-tafsir-dan-analisa-ekonomi.html> di download tanggal 02 september 2020

Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

La Midjan, dan Azhar Susanto. *Sistem Informasi Akuntansi I*. Edisi Keenam : Lembaga Informasi Akuntansi. 2000.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2002.

Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2004

Marja Sinurat, "*Akuntansi Keuangan Daerah*". Ghalia Indonesia. 2018.

Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2006

Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. 2001

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggra

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2006

- Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 10 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Purhantara, W. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2010), hlm 79
- Riyanti Umi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan*. Riau. Jurnal. 2011
- Romney, Marshall B., Stembart and Paul John. *Accounting Information System*. New Jersey : Prentice Hall. 2006.
- Sanusi, A. *Metode penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2013
- Sugianto, Catur. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: BPFE. 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta.2006), hlm. 34
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009
- V. Wiratna Sujarweni. “*Analisis Laporan Keuangan*”. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.2017
- Zikmund, William G. *Business Research Methods*. USA : Dryden Press. Hill, New York. 1997

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Daftar Checklist

No	Uraian Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		✓
2.	Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik		✓
3.	Apakah transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi		✓
4.	Apakah Kantor Camat Semadam melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	✓	
5.	Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Camat Semadam didukung oleh bukti transaksi		✓
6.	Apakah Kantor Camat Semadam semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis	✓	
7.	Apakah Kantor Camat Semadam melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi		✓
8.	Apakah Kantor Camat Semadam melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing		✓
9.	Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan	✓	
10.	Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi		✓
11.	Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	✓	

12.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu	✓	
13.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang		✓
14.	Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi		✓
15.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian keputusan	✓	
16.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur	✓	
17	Apakah Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda	✓	
18	Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu	✓	
19.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	✓	
20.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama	✓	
21.	Apakah informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas		✓
22.	Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Camat Semadam sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.		✓

23.	Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Semadam memiliki kualitas yang baik		✓
24.	Apakah Kantor Camat Semadam mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan		✓

LAMPIRAN II : Daftar Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Semadam telah terelialisasikan dengan baik?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan di Kantor Kecamatan Semadam sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku?
3. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, bagaimanakah kantor Kecamatan Semadam menerapkan laporan keuangan yang efektif?
4. Apasaja Keuntungan yang diperoleh oleh Kantor Kecamatan Semadam setelah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kegiatan pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Semadam sebelum dan sesudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
6. Apasajakah hambatan - hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Semadam?
7. Apasajakah permasalahan yang ditemukan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara?
8. Apakah Kantor Kecamatan Semadam masih terjadi keterlambatan dalam hal melaporkan laporan keuangannya?

DAFTAR JAWABAN

1. Sudah diterapkan bahkan sejak tahun 2015, akan tetapi penerapan sistem tersebut belum diterapkan secara evisien
2. Sudah, dan diterapkan berdasarkan undang - undang dalam negeri No. 64 Tahun 2013 dan Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
3. Dengan melakukan transaksi pengelolaan keuangan secara nontunai, dan melakukan penataan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) mengacu pada

pemendagri No. 55 Tahun 2008 tentang tatacara pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan bendahara pengeluaran atau penerimaan

4. Pelaporan dan seluruh komponen dapat di akses secara cepat ketika dibutuhkan pada saat itu.
5. Sebelum menerapkan sistem tersebut, pelaporan masih menggunakan sistem manual. Setelah menggunakan peraturan pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga setelah menggunakan aplikasi Simda Keuangan, akhirnya memudahkan dalam hal kegiatan pelaporan
6. Salah satu hambatannya adalah aparatur yang mengelola atau yang menyusun laporan keuangan tersebut tidak memiliki besik dalam hal akuntansi, karena aparatur tersebut bukan dari pendidikan ekonomi atau akuntansi
7. Permasalahan yang ada mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Semadam seperti, Kantor Kecamatan Semadam tidak membuat laporan arus kas, Kantor Kecamatan Semadam tidak melakukan penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh instansi tersebut dan hal tersebut terjadi dikarena SDM nya masih kurang
8. Kantor Kecamatan Semadam hampir sering mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan, sehingga untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan, Kantor Kecamatan Semadam terkadang harus dibantu oleh pihak bagian keuangan Kantor Bupati Aceh Tenggara untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan yang sudah mengalami keterlambatan dalam pelaporan.

LAMPIRAN III : Dokumen Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Kabid Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 2

Wawancara dengan Bendahara Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
CAMAT SEMADAM

Jalan. T. Panglima Polem No.5 Semadam Asal 24673

Nomor : 145 /CS / 2020
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Izin Riset

Semadam Asal, 5 Agustus 2020
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor:B-1836/EB.I/KS.02/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 hal Izin Riset, Dengan ini kami informasikan pada dasarnya kami menyetujui Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibawah ini :

Nama : Wirja Wahyu Pratama
Nim : 0502162126
Program Studi : Akutansi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Analisis Penerapan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kantor Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara

Untuk melakukan Riset di kantor kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dalam batas-batas informasi yang dapat dipublikasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih

Semadam Asal, 5 Agustus 2020

a.n CAMAT SEMADAM
Sekretaris Camat


MUHBURRAHMAN S. Sos
NIP.19720804 200801 1 002

Gambar 3

Surat Keterangan Izin Riset pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN SEMADAM

NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	625.000	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara BLUD	-	-
Kas di Bendahara JKN	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang BLUD	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Persediaan	802.000	738.000
Jumlah Aset Lancar	1.427.000	738.000
ASET TETAP		
Tanah	70.000.000	70.000.000
Peralatan dan Mesin	157.120.000	157.120.000
Gedung dan Bangunan	154.000.000	116.050.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(740.143.905)	(708.622.987)
Jumlah Aset Tetap	(359.023.905)	(365.452.987)
ASET LAINNYA		
Tuntutan Perbendaharaan	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	(357.596.905)	(364.714.987)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	-	-
Utang Beban	-	227.540
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	227.540
Jumlah Kewajiban	-	227.540
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	(8.640.750.939)	(6.570.825.771)
R/K PPKD	8.283.154.034	6.205.885.244
Jumlah Ekuitas	(357.596.905)	(364.942.527)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(357.596.905)	(364.714.987)

Gambar 4
Laporan Neraca Keuangan pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh
Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN SEMADAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	#DIV/0!	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	#DIV/0!	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	#DIV/0!	-
Pendapatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	20.892.000,00	23.851.786,00	114,17	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20.892.000,00	23.851.786,00	114,17	-
JUMLAH PENDAPATAN	20.892.000,00	23.851.786,00	114,17	-
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.738.948.001,00	1.591.970.790,00	91,55	-
Belanja Barang dan Jasa	570.195.000,00	484.675.000,00	85,00	-
Jumlah Belanja Operasi	2.309.143.091,00	2.076.645.790,00	89,93	-
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA	2.309.143.091,00	2.076.645.790,00	89,93	-
SURPLUS/DEFISIT	(2.288.251.091,00)	(2.052.794.004,00)	89,71	-

Gambar 5

Laporan Realisasi Anggaran Keuangan pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN SEMADAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Ekuitas Awal	(364.942.527)	1.939.400.273
Surplus/ Defisit LO	(2.107.875.168)	(1.916.566.884)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
- Koreksi Nilai Kas	-	-
- Koreksi Nilai Piutang	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Koreksi Nilai Aset Tetap	37.950.000	(2.273.194.000)
- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	-	-
- Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
- Koreksi Nilai Lainnya	-	-
R/K PPKD	2.077.270.790	1.885.418.084
Ekuitas Akhir	(357.596.905)	(364.942.527)

Gambar 6

Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh
tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN SEMADAM

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Restribusi Daerah	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Pendapatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	-	23.851.786
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	23.851.786
BEBAN		
BEBAN OPERASI		
Beban Pegawai	1.591.970.790	1.589.869.870
Beban Barang dan Jasa	484.383.460	318.759.800
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.520.918	31.789.000
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Lain-Lain	-	-
Jumlah Beban Operasi	2.107.875.168	1.940.418.670
JUMLAH BEBAN	2.107.875.168	1.940.418.670
SURPLUS/DEFISIT LO	(2.107.875.168)	(1.916.566.884)

Gambar 7

Laporan Operasional pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara

Daftar Riwayat Hidup

Data pribadi

Nama : Wirja Wahyu Pratama
NIM : 0502162126
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta Timur, 10 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Medan - Kutacane No. 9 Kec. Bukit Tusam
Email : wahyuwirjap@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003 – 2004 : TK WASYAAH
2. Tahun 2004 – 2009 : SDN LAWE DUA
3. Tahun 2009 – 2015 : PP. AR-RAUDHATUL HASANAH
4. Tahun 2016 – 2020 : S1 AKUNTANSI SYARIAH UINSU MEDAN

Riwayat Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan 2017-2018
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan 2018-2019